PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN EKSPLOITASI PADA MASA KOLONIAL BELANDA: JALAN RAYA POS ANYER–PANARUKAN DAN SISTEM TANAM PAKSA

Ahmad Fauzi Daulay[1], Muhammad Wali Al Khalidi[2], Wahyudi[3], Yeheskiel Pranata Nainggolan[4]

[1234]Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

[1]fauzidly.3523121010@mhs.unimed.ac.id,

[2]muhammadwalialkhalidi719@gmail.com, [3] dhawahyu0@gmail.com,

[4]kielnainggolan18@gmail.com

ABSTRACT

*Dutch colonial policy in Indonesia was not solely oriented toward economic development and improvement; it also entailed the exploitation of the labor and resources of the indigenous population. This is exemplified by the construction of the Great Post Road (Jalan Raya Pos) from Anyer to Panarukan under Herman Willem Daendels, and the implementation of the Cultivation System (Cultuurstelsel) under Johannes van den Bosch. This study aims to compare the backgrounds and underlying interests of both policies, identify differences in their implementation mechanisms, analyze the forms of exploitation—involving labor, land, and agricultural produce—and examine the resulting social and economic impacts on the indigenous population. The research employs a historical method based on a literature review, involving the collection, examination, and analysis of relevant written sources, including scholarly journals and research articles. The analysis follows the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that the approximately 1,000-kilometer-long Great Post Road was constructed primarily to strengthen colonial defenses, accelerate troop mobilization, facilitate communication, and exert control over the colonial territory; its execution relied on the mobilization of indigenous labor through a system of forced labor (*rodi*). Meanwhile, the Cultivation System, implemented between 1830 and 1870, sought to increase the production of export commodities and boost Dutch government revenue by requisitioning the land, labor, and agricultural output of the local population. In practice, the implementation often deviated from formal regulations, placing a heavy burden on farmers and disrupting their ability to meet their own food needs. Although these two policies differed in their immediate objectives and operational mechanisms, both prioritized colonial interests and inflicted suffering upon the indigenous people. This study concludes that infrastructure development and economic exploitation were interconnected components in the maintenance of Dutch colonial rule in Indonesia.*

Keywords: *colonialism, Great Post Road, Cultivation System, exploitation, indigenous society.*

ABSTRAK

Kebijakan kolonial Belanda di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan peningkatan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya masyarakat pribumi. Permasalahan tersebut terlihat dalam pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan pada masa Herman Willem Daendels dan penerapan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada masa Johannes van den Bosch. Penelitian ini secara khusus bertujuan membandingkan latar belakang dan kepentingan yang mendasari kedua kebijakan, mengidentifikasi perbedaan mekanisme pelaksanaannya, menganalisis bentuk eksploitasi tenaga kerja, tanah, dan hasil pertanian, serta mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat pribumi. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis sumber tertulis yang relevan, termasuk jurnal ilmiah dan artikel penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jalan Raya Pos sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer dibangun terutama untuk memperkuat pertahanan, mempercepat mobilisasi pasukan, memperlancar komunikasi, dan mengendalikan wilayah kolonial. Pelaksanaannya mengandalkan pengerahan tenaga kerja pribumi melalui sistem kerja paksa atau rodi. Sementara itu, Sistem Tanam Paksa yang diterapkan pada 1830–1870 bertujuan meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pemasukan pemerintah Belanda melalui pengerahan tanah, tenaga kerja, dan hasil pertanian masyarakat. Pelaksanaannya sering menyimpang dari ketentuan formal sehingga membebani petani dan mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan. Kedua kebijakan memiliki tujuan langsung dan mekanisme berbeda, tetapi sama-sama mengutamakan kepentingan kolonial serta menimbulkan penderitaan masyarakat pribumi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dan eksploitasi ekonomi merupakan bagian yang saling berkaitan dalam mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

Kata Kunci: kolonialisme, Jalan Raya Pos, Sistem Tanam Paksa, eksploitasi, masyarakat pribumi.

A. Pendahuluan

Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah kolonial tidak hanya dilakukan melalui penguasaan politik dan militer, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur serta pengaturan sumber daya ekonomi dan tenaga kerja. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah kolonial dan meningkatkan keuntungan bagi Belanda. Namun, pelaksanaannya sering kali menimbulkan beban bagi masyarakat pribumi karena tenaga kerja, tanah, dan hasil pertanian mereka digunakan untuk memenuhi kepentingan kolonial. Fenomena tersebut dapat dilihat melalui pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels dan penerapan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada masa pemerintahan Johannes van den Bosch.

Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan dibangun sekitar tahun 1808–1811 dengan panjang kurang lebih 1.000 kilometer. Pembangunan ini bertujuan memperkuat pertahanan, mempercepat mobilisasi pasukan dan logistik, memperlancar komunikasi antardaerah, serta meningkatkan pengendalian pemerintah kolonial terhadap wilayah Jawa. Meskipun kemudian menjadi bagian penting dari jaringan transportasi, proses pembangunannya melibatkan pengerahan tenaga kerja pribumi melalui sistem kerja paksa atau rodi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pada masa kolonial tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik dan militer serta pengorbanan masyarakat yang melaksanakannya (Sinaga et al., 2025).

Permasalahan serupa juga terlihat dalam penerapan Sistem Tanam Paksa yang dimulai pada tahun 1830. Sistem ini digagas oleh Johannes van den Bosch untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor dan menambah pemasukan pemerintah Belanda setelah mengalami tekanan keuangan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat diwajibkan menyediakan sebagian tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan tanaman perdagangan, seperti kopi, tebu, dan

nila. Meskipun terdapat ketentuan formal mengenai pelaksanaannya, praktik di lapangan sering menyimpang akibat tekanan terhadap petani dan penyalahgunaan kekuasaan. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat mengalami beban ekonomi, berkurangnya kesempatan mengelola lahan untuk kebutuhan pangan, serta penderitaan di sejumlah wilayah (Sondarika, 2017; Aprilia et al., 2021).

Jalan Raya Pos dan Sistem Tanam Paksa memiliki bentuk serta tujuan langsung yang berbeda. Jalan Raya Pos berorientasi pada pembangunan infrastruktur untuk kepentingan pertahanan, komunikasi, dan pengendalian wilayah, sedangkan Sistem Tanam Paksa berorientasi pada peningkatan produksi pertanian ekspor dan pendapatan pemerintah kolonial. Akan tetapi, keduanya memiliki persamaan mendasar, yaitu memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya masyarakat pribumi untuk mendukung kepentingan Belanda. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan produksi ekonomi pada masa kolonial perlu dikaji tidak hanya berdasarkan hasil fisik atau keuntungan yang diperoleh pemerintah, tetapi juga berdasarkan mekanisme pelaksanaan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada perbandingan tujuan, latar belakang, mekanisme pelaksanaan, bentuk eksploitasi, serta dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan dan penerapan Sistem Tanam Paksa. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perbedaan dan persamaan kedua kebijakan, mengidentifikasi bentuk pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya pribumi, serta menganalisis hubungan antara pembangunan, kepentingan ekonomi-politik, dan eksploitasi dalam sistem kolonial Belanda. Penelitian dilakukan menggunakan metode historis dengan pendekatan studi literatur melalui penelaahan sumber tertulis yang relevan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis dengan menambah pemahaman mengenai kebijakan kolonial Belanda dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Selain

itu, kajian ini dapat menjadi bahan pembelajaran sejarah untuk mengembangkan pemikiran kritis dalam menilai kebijakan pembangunan pada masa lalu, khususnya dengan membandingkan kepentingan pemerintah kolonial dan kondisi masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan membantu menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi pada masa kolonial memiliki keterkaitan erat dengan upaya mempertahankan kekuasaan serta praktik eksploitasi terhadap masyarakat Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji dan membandingkan kebijakan pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels dan penerapan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada masa pemerintahan Johannes van den Bosch. Metode historis digunakan untuk memahami peristiwa masa lalu melalui penelusuran sumber, pengujian informasi, penafsiran fakta, dan penyusunan uraian sejarah secara sistematis. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang membahas kebijakan kolonial Belanda, pelaksanaan kedua kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat pribumi. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan kritik sumber untuk menilai relevansi dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah guna memahami persamaan dan perbedaan tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk eksploitasi dalam kedua kebijakan. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian sejarah yang sistematis berdasarkan hasil penelaahan dan interpretasi sumber. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan latar belakang, tujuan, pelaksanaan,

dan dampak pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan dengan Sistem Tanam Paksa. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kepentingan politik, militer, dan ekonomi pemerintah kolonial dengan pemanfaatan tenaga kerja serta sumber daya masyarakat pribumi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sistematis mengenai persamaan, perbedaan, dan konsekuensi kedua kebijakan dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui penguasaan wilayah secara politik dan militer, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur serta pengaturan terhadap tanah, tenaga kerja, dan hasil produksi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah kolonial pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memperkuat kekuasaan dan memenuhi kepentingan pemerintah kolonial. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui dua kebijakan yang memiliki bentuk berbeda, yaitu pembangunan Jalan Raya Pos Anyer– Panarukan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels dan penerapan Sistem TanamPaksa atau Cultuurstelsel pada masa Johannes van den Bosch. Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan dibangun pada masa pemerintahan Daendels, yaitu sekitar tahun 1808–1811. Daendels datang ke Jawa dalam kondisi politik dan militer yang tidak stabil karena adanya ancaman Inggris terhadap wilayah kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, salah satu kebutuhan utama pemerintah kolonial pada masa tersebut adalah memperkuat pertahanan serta mempercepat hubungan antardaerah. Pembangunan jalan yang menghubungkan Anyer di bagian barat Pulau Jawa dengan Panarukan di bagian timur menjadi salah satu proyek utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jalan tersebut memiliki panjang kurang lebih 1.000 kilometer dan berfungsi untuk memperlancar mobilisasi pasukan, distribusi logistik, komunikasi, serta pengendalian wilayah kolonial (Sinaga et al., 2025). Berbeda dengan kebijakan Daendels yang sangat berkaitan dengan pertahanan dan pembangunan infrastruktur, Sistem

Tanam Paksa yang mulai diterapkan pada tahun 1830 memiliki latar belakang ekonomi yang lebih kuat. Kebijakan tersebut digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman komoditas ekspor sehingga pemerintah Belanda memperoleh pemasukan dari wilayah jajahan. Sistem tersebut berlangsung hingga tahun 1870 dan mengarahkan sebagian sumber daya pertanian masyarakat untuk menghasilkan tanaman yang memiliki nilai jual di pasar Eropa (Sondarika, 2021).

Dengan demikian, sejak awal kedua kebijakan tersebut telah menunjukkan orientasi yang berbeda. Jalan Raya Pos berangkat dari kebutuhan strategis berupa pertahanan, komunikasi, dan pengendalian wilayah, sedangkan Tanam Paksa berangkat dari kebutuhan ekonomi berupa peningkatan produksi komoditas ekspor dan pemasukan bagi pemerintah kolonial. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan mendasar, yaitu pelaksanaannya sangat bergantung pada pengerahan sumber daya masyarakat pribumi.

Pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sebagai Kebijakan Infrastruktur Kolonial

Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan merupakan salah satu proyek pembangunan terbesar pada masa pemerintahan Daendels. Pembangunan jalan tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan transportasi masyarakat, melainkan memiliki tujuanutama yang berhubungan dengankepentingan pertahanan pemerintah kolonial. Letak Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur membuat pemerintah membutuhkan sarana yang dapat mempercepat pergerakan pasukan dan logistik. Ancaman Inggris pada masa tersebut membuat kebutuhan terhadap jalur transportasi yang lebih cepat menjadi semakin penting (Sinaga et al., 2025). Jalur tersebut membentang dari Anyer hingga Panarukan dengan panjang kurang lebih 1.000 kilometer. Pembangunannya dilakukan melalui beberapa tahap. Pada bagian Anyer–Batavia, pembangunan dilakukan dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada. Hasilnya, waktu perjalanan yang sebelumnya membutuhkan beberapa

hari dapat dipersingkat secara signifikan. Pembangunan kemudian dilanjutkan menuju Buitenzorg, Priangan, Karangsembung, hingga wilayah Jawa bagian timur. Karena keterbatasan anggaran pemerintah, pembangunan pada wilayah tertentu diserahkan kepada para bupati. Dengan demikian, pemerintah kolonial tidak hanya menggunakan birokrasi kolonial secara langsung, tetapi juga memanfaatkan struktur pemerintahan pribumi untuk menjalankan proyek tersebut (Sinaga et al., 2025). Dari sudut pandang pembangunan, keberadaan Jalan Raya Pos memberikan perubahan penting terhadap hubungan antardaerah di Pulau Jawa. Jalan tersebut mempercepat pergerakan orang, barang, informasi, dan pasukan. Dalam perkembangan berikutnya, jalur tersebut juga memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan terbentuknya jaringan transportasi yang lebih luas. Beberapa pusat kegiatan ekonomi kemudian berkembang di sepanjang jalur tersebut. Oleh karena itu, secara fisik pembangunan Jalan Raya Pos memang meninggalkan warisan infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang bagi perkembangan transportasi di Jawa (Sinaga et al., 2025). Namun, apabila pembangunan tersebut dilihat dari sisi masyarakat yang mengerjakannya, terdapat persoalan yang sangat besar. Pembangunan tidak dilakukan sepenuhnya dengan tenaga kerja yang memperoleh upah secara layak. Masyarakat pribumi dikerahkan melalui sistem kerja paksa atau rodi. Beban pekerjaan yang berat, kondisi kerja yang buruk, serta keterbatasan kebutuhan dasar menyebabkan masyarakat mengalami penderitaan. Sumber yang dikaji menyebutkan adanya korban akibat kelelahan, kelaparan, dan penyakit selama proses pembangunan (Sinaga et al., 2025).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa istilah“pembangunan” dalam konteks kolonial perlu dipahami secara kritis. Jalan yang dibangun memang menghasilkan perubahan fisik dan memberikan manfaat tertentu dalam perkembangan transportasi, tetapi proses pembangunannya dibebankan kepada masyarakat pribumi. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai

penerima manfaat, melainkan terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan pengendalian pemerintah kolonial. Karena itu, pembangunan dan eksploitasi berjalan secara bersamaan dalam proyek Jalan Raya Pos.

Sistem Tanam Paksa sebagai Kebijakan Eksploitasi Ekonomi

Jika Jalan Raya Pos menunjukkan bentuk eksploitasi melalui pengerahan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur, Sistem Tanam Paksa memperlihatkan bentuk eksploitasi yang lebih luas karena mencakup tanah, tenaga kerja, dan hasil pertanian masyarakat. Sistem ini diterapkan sejak tahun 1830 dan berlangsung sampai tahun 1870. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasardunia sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda (Sondarika, 2021). Secara resmi, terdapat sejumlah ketentuan mengenai pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Penduduk desa diwajibkan menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan. Bagian tanah tersebut secara ketentuan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian penduduk. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib juga secara aturan dibebaskan dari pajak tanah. Hasil tanaman wajib kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Ketentuan lain juga menyatakan bahwa kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial (Sondarika, 2021). Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup besar antara ketentuan formal dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu memiliki kebebasan untuk menentukan penggunaan tanah mereka. Pemerintah kolonial memanfaatkan struktur birokrasi dan penguasa pribumi untuk memastikan agar kewajiban tanam dapat dilaksanakan. Dengan demikian, sistem yang secara administratif memiliki aturan tertentu pada akhirnya dapat menjadi sarana pengerahan sumber daya masyarakat secara paksa. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi adalah penggunaan tanah pertaniansecara berlebihan untuk kepentingan tanaman wajib. Petani yang

seharusnya dapat menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dapat kehilangan sebagian ruang produksinya karena tanah tersebut dialihkan untuk tanaman komoditas yang dibutuhkan pemerintah kolonial. Selain tanah, tenaga masyarakat juga digunakan untuk berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan produksi dan pengangkutan tanaman wajib. Sumber mengenai praktik Tanam Paksa menunjukkan bahwa petani bahkan dapat dipaksa menanam tanaman yang telah ditentukan pemerintah di tanah mereka sendiri. Hasil produksi yang diperoleh juga tidak sepenuhnya berada dalam kebebasan petani karena hasil tersebut diarahkan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani kehilangan sumber pendapatan dan kedudukannya berubah menjadi penggarap di atas tanah yang mereka miliki sendiri (Sondarika, 2021). Selain itu, pengerahan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. Kerja wajib digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian dan kepentingan umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi dalam Sistem Tanam Paksa tidak hanya berbentuk penguasaan hasil pertanian, tetapi juga melibatkan penguasaan terhadap waktu dan tenaga masyarakat.

Perbandingan Tujuan Jalan Raya Pos dan Sistem Tanam Paksa

Apabila kedua kebijakan tersebut dibandingkan berdasarkan tujuan utamanya, terdapat perbedaan yang cukup jelas. Jalan Raya Pos dibangun terutama untuk kepentingan pertahanan, komunikasi, transportasi,dan pengendalian wilayah. Sementara itu, Sistem Tanam Paksa bertujuan meningkatkan produksi tanaman ekspor dan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah Belanda. Perbedaan tujuan tersebut kemudian menghasilkan bentuk pelaksanaan yang berbeda. Pada pembangunan Jalan Raya Pos, sumber daya utama yang dikerahkan adalah tenaga manusia untuk menghasilkan sebuah infrastruktur fisik. Masyarakat bekerja untuk membuka, memperbaiki, memperlebar, dan membangun jalur jalan. Hasil akhirnya berupa jaringan jalan yang dapat digunakan untuk mobilitas dan transportasi. Sementara

itu, pada Sistem Tanam Paksa, sumber daya yang dikerahkan jauh lebih kompleks. Pemerintah kolonial menggunakan tanah pertanian masyarakat, tenaga kerja petani, hasil tanaman, serta struktur pemerintahan desa untuk menghasilkan komoditas yang dapat dipasarkan. Dengan demikian, apabila Jalan Raya Pos terutama mengeksploitasi tenaga kerja dalam proses pembangunan, Sistem Tanam Paksa mengeksploitasi hubungan antara tanah, tenaga kerja, dan hasil produksi pertanian. Perbedaantersebut menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi kolonial tidak selalu sama. Eksploitasi dapat dilakukan melalui pengerahan tenaga untuk membangun sarana fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui pengaturan produksi ekonomi. Dalam kasus Jalan Raya Pos, rakyat digunakan sebagai tenaga pembangunan. Dalam Sistem Tanam Paksa, rakyat ditempatkan sebagai penghasil komoditas yang produksinya diarahkan untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Persamaan dalam Mekanisme Kekuasaan Kolonial

Meskipun berbeda dalam tujuan dan bentuk pelaksanaannya, kedua kebijakan memiliki persamaan dalam hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial memiliki kekuasaan untuk menentukan kebutuhan pembangunan maupun produksi, sedangkan masyarakat menjadi pihak yang menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada pembangunan Jalan Raya Pos, keterbatasan anggaran pemerintah membuat sebagian pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada para bupati. Hal tersebut menunjukkan pentingnya struktur pemerintahan pribumi sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat. Para bupati memiliki posisi strategis dalam mengerahkan tenaga masyarakat untuk memenuhi target pembangunan (Sinaga et al., 2025). Pola yang hampir serupa juga dapat ditemukan dalam Sistem Tanam Paksa.Pemerintahkolonial memanfaatkan kepala-kepala pribumi danorganisasi desa untuk mengatur penyerahan tanah, pelaksanaan penanaman, hingga pengumpulan hasil produksi. Dengan demikian, kolonialisme tidak selalu bekerja

hanya melalui aparat Belanda secara langsung. Struktur pemerintahan lokal juga menjadi bagian penting dalam menjalankan kebijakan kolonial. Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perbandingan kedua kebijakan. Keduanya memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial dapat bekerja melalui struktur administrasi yang sudah ada. Pemerintah kolonial dapat mencapai tujuan pembangunan maupun ekonomi dengan memanfaatkan pejabat dan struktur sosial di tingkat lokal. Akibatnya, tekanan kebijakan kolonial dapat langsung dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat

Dampak pembangunan Jalan Raya Pos terhadap masyarakat terutama terlihat dalam bentuk beban kerja dan penderitaan selama proses pembangunan. Kerja paksa membuat masyarakat harus meninggalkan aktivitas kehidupan sehari-hari dan mengerjakan proyek yang ditentukan pemerintah. Kondisi kerja yang berat menyebabkan banyak masyarakat mengalami kelelahan, kelaparan, penyakit, bahkan kematian. Pada saat yang sama, jalan yang dibangun kemudian memberikan manfaat terhadap mobilitas, komunikasi, dan perdagangan di Jawa (Sinaga et al., 2025). Dampak Sistem Tanam Paksa lebih luas dalam kehidupan ekonomi pedesaan karena berkaitan langsung dengan kegiatan pertanian masyarakat. Penggunaan tanah untuk tanaman wajib dapat mengurangi ruang masyarakat untuk memproduksi kebutuhan pangan. Eksploitasi tenaga kerja juga meningkatkan beban masyarakat. Dalam sumber yang dikaji, praktik Tanam Paksa dikaitkan dengan penderitaan, kelaparan, dan kematian di sejumlah wilayah sebagai akibat dari penyimpangan dalam pelaksanaannya (Sondarika, 2021). Di sisi lain, Sistem Tanam Paksa juga membawa perubahan dalam kehidupan ekonomi pedesaan. Produksi tanaman komoditas ekspor berkembang dan hubungan masyarakat dengan ekonomi uang semakin kuat. Namun perubahan tersebut tidak secara otomatis berarti meningkatnya kesejahteraan petani. Sumber penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi uang bahkan dapat menggeser sistem ekonomi pertanian subsisten yang sebelumnya menjadi bagian penting

dari kehidupan masyarakat pedesaan (Sondarika, 2021). Oleh karena itu, dampak kedua kebijakan perlu dilihat secara dua sisi. Jalan Raya Pos menghasilkan infrastruktur yang kemudian berguna bagi mobilitas dan perdagangan,tetapiproses pembangunannya menimbulkan penderitaan. Tanam Paksa meningkatkan produksi komoditas ekspor dan memberikan pemasukan bagi pemerintah kolonial, tetapi pelaksanaannya memberikan tekanan besar terhadap kehidupan petani. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan atau pertumbuhan produksi tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban.

Perbandingan Bentuk Eksploitasi

Perbandingan bentuk eksploitasi menjadi bagian penting untuk memahami perbedaan kedua kebijakan tersebut. Pada Jalan Raya Pos, eksploitasi terutama diwujudkan melaluipengerahan tenaga manusia. Rakyat dipaksa mengerjakanproyek pembangunan dalam kondisi yang berat dan tanpa imbalan yang layak. Eksploitasi tersebut secara langsung berkaitan dengan tubuh dan tenaga masyarakat. Pada Sistem Tanam Paksa, bentuk eksploitasi lebih berlapis. Tanah pertanian masyarakat diarahkan untuk menghasilkan tanaman komoditas ekspor. Tenaga petani digunakan dalam proses penanaman, pemeliharaan, panen, dan pengangkutan. Hasil pertanian kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dengan demikian, sistem tersebut tidak hanya mengambil tenaga masyarakat, tetapi juga mengarahkan sumber daya agraria dan hasil produksinya kepada kepentingan kolonial. Perbedaan ini memperlihatkanbahwa kebijakan kolonial memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bentuk eksploitasi dengan tujuan yang hendak dicapai.Ketika pemerintah membutuhkan infrastruktur pertahanan dan komunikasi, tenaga rakyat dikerahkan untuk membangun jalan. Ketika pemerintah membutuhkan pemasukan ekonomi, tanah dan tenaga masyarakatdiarahkanuntuk menghasilkan komoditas ekspor.

Hubungan antara Pembangunan,Eksploitasi, dan Kepentingan Kolonial

Jika dilihat secara keseluruhan, Jalan Raya Pos dan Sistem Tanam Paksa memperlihatkan hubungan erat antara pembangunan dan eksploitasi pada masa kolonial. Pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri karena dibutuhkan untuk memperkuat sistem pemerintahan, pertahanan, komunikasi, dan mobilitas. Demikian pula kegiatan produksi pertanian tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat, tetapi diarahkan agar menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi bagi pemerintah kolonial. Jalan Raya Pos bahkan dapat dilihat sebagai bagian dari pembangunan yang sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah kolonial dalam menguasai wilayah. Jalan yang lebih baik membuat pergerakan pasukan menjadi lebih cepat dan komunikasi antardaerah menjadi lebih mudah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki fungsi administratif dan militer selain fungsi transportasi. Sementara itu, Sistem Tanam Paksa memperkuat posisi ekonomi pemerintah kolonial melalui pengendalian terhadap kegiatan pertanian.

Produksi komoditas ekspor dapat ditingkatkan dengan menggunakan struktur pemerintahan lokal dan tenaga masyarakat. Dengan demikian, penguasaan wilayah kolonial tidak hanya dilakukan dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui pengaturan kegiatanekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pembangunan dan eksploitasi bukanlah dua hal yang sepenuhnya terpisah. Pembangunan dapat menjadi sarana untuk memperkuat kekuasaan, sedangkan eksploitasisumber daya dapat menjadi sumber pembiayaan dan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Kedua hal tersebut saling mendukung dalammempertahankan sistem kolonial.

Perbedaan Dampak Jangka Panjang

Perbedaan antara kedua kebijakan juga terlihat dari warisan yang ditinggalkannya, Jalan Raya Pos meninggalkan jaringan infrastruktur yang kemudian terus digunakan dan dikembangkan dalam sistem transportasi di Jawa. Keberadaan jalan tersebut memberikan dasar bagi peningkatan mobilitas orang dan barang serta perkembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang

jalurnya (Sinaga et al., 2025). Sementara itu, Sistem Tanam Paksa meninggalkan perubahan yang lebih kuat dalam struktur ekonomi pertanian. Sistem tersebut memperluas orientasi produksi komoditas ekspor dan memperkuat keterkaitan wilayah jajahan dengan kebutuhan pasar dunia. Namun, pada tingkat masyarakat, sistem tersebut juga meninggalkan persoalan berupa tekanan terhadap petani, perubahan pola ekonomi pedesaan, dan pengalaman panjang mengenai eksploitasi tenaga serta hasil pertanian. Bahkan setelah Sistem Tanam Paksa berakhir pada tahun 1870, berakhirnya sistem tersebut tidak langsung menghilangkan penderitaan masyarakat pedesaan. Sumber yang digunakan menunjukkan bahwa perubahan menuju sistem ekonomi liberal tetap memberikan tekanan kepada petani (Sondarika, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan kolonial tidak selalu berarti perubahan langsung terhadap kondisi sosialekonomi masyarakat.

Makna Perbandingan Jalan Raya Pos dan Sistem Tanam Paksa

Berdasarkan perbandingan tersebut, Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan dan Sistem Tanam Paksa dapat dipahami sebagai dua bentuk kebijakan kolonial yang memiliki tujuan langsung berbeda tetapi bekerja dalam kerangka kepentingan kolonial yang sama. Jalan Raya Posberorientasi pada pembangunan infrastruktur dan penguatan pertahanan, sedangkan Sistem Tanam Paksa berorientasi pada produksi komoditas dan pemasukan ekonomi. Namun, keduanya sama-sama menggunakan sumber daya masyarakat pribumi untuk mencapai tujuanpemerintah kolonial. Perbedaan paling mendasar terletak pada jenis sumber daya yang menjadi sasaran pengerahan. Jalan Raya Pos terutama membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan pembangunan fisik. Sementara itu, Sistem Tanam Paksa membutuhkan tanah, tenaga kerja, dan hasil pertanian untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, bentuk penderitaan masyarakat dalam kedua kebijakan tersebut juga tidak sepenuhnya sama. Jalan Raya Pos menunjukkan bagaimana sebuah proyek pembangunan dapat memiliki manfaat infrastruktur dalam jangka panjang,

tetapi proses pembangunannya dapat dilakukan melalui cara-cara yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, Sistem Tanam Paksa menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dapat meningkatkan produksi dan pemasukan pemerintah kolonial, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tekanan terhadap kehidupan petani dan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, perbandingan kedua kebijakantersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pada masa kolonial tidak dapat hanya dinilai berdasarkan hasil akhirnya. Jalan yang berhasil dibangun dan meningkatnya produksi komoditas ekspor memang merupakan bagian dari hasil kebijakan kolonial, tetapi proses untuk mencapainya juga perlu diperhatikan. Dalam kedua kasus tersebut, masyarakat pribumi menjadi pihak yang menyediakan tenaga, tanah, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial. Pada akhirnya, Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan dan Sistem Tanam Paksa memperlihatkan dua wajah kebijakan kolonial. Jalan Raya Pos menunjukkan wajah pembangunan infrastruktur yang disertai pengerahan tenaga secara paksa, sedangkan Sistem Tanam Paksa menunjukkan wajah kebijakan ekonomi yang mengarahkan tanah, tenaga, dan produksi masyarakat untuk kepentingan kolonial. Keduanya memiliki perbedaan dalam tujuan dan mekanisme, tetapi memiliki persamaan dalam hubungan kekuasaan yang menempatkan kepentingan pemerintah kolonial di atas kepentingan masyarakat pribumi. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pembangunan dan eksploitasi pada masa kolonial merupakan bagian yang saling berkaitan dalam proses mempertahankan kekuasaan dan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial di Indonesia.

D. Kesimpulan

Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan pada masa Daendels (1808-1811) dan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) pada masa Van den Bosch (1830-1870) adalah dua kebijakan kolonial Belanda dengan tujuan dan bentuk yang berbeda. Jalan Raya Pos, sepanjang sekitar 1.000 kilometer, dibangun untuk kepentingan pertahanan, komunikasi, transportasi, dan mobilisasi pasukan menghadapi ancaman Inggris. Sistem

Tanam Paksa dijalankan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mengisi kas pemerintah Belanda yang tertekan akibat peperangan. Perbedaan itu juga tampak pada bentuk eksploitasinya. Pada Jalan Raya Pos, yang dikerahkan terutama tenaga kerja melalui rodi, tanpa upah yang layak dan dalam kondisi berat sehingga menimbulkan kelelahan, kelaparan, penyakit, dan kematian. PadaTanam Paksa, eksploitasinya lebih berlapis karena mencakup tanah, tenaga kerja, dan hasil pertanian. Dalam praktiknya, pelaksanaan Tanam Paksa banyak menyimpang dari aturan formal, misalnya batas seperlima tanah dilampaui dan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, petani kehilangan ruang untuk menanam pangan dan di sejumlah wilayah terjadi kelaparan. Meski berbeda, keduanya memiliki persamaan mendasar. Keduanya bergantung pada pengerahan sumber daya masyarakat pribumi untuk kepentingan pemerintah kolonial dan berjalan melalui struktur pemerintahan lokal, yaitu para bupati dan kepala-kepala pribumi sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat. Dampak keduanya juga bersisi ganda. Jalan Raya Pos meninggalkan jaringan transportasi yang kemudian mendukung mobilitas dan perdagangan di Jawa, tetapi dibangun dengan penderitaan rakyat. Tanam Paksa memberi pemasukan besar bagi Belanda dan memperluas produksi komoditas ekspor, tetapi menekan kehidupan petani dan menggeser ekonomi subsisten. Berakhirnya Tanam Paksa pada 1870 pun tidak serta-merta meringankan beban masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, pembangunan pada masa kolonial tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhirnya, seperti jalan yang berdiri atau produksi yang meningkat. Proses pencapaiannya, serta siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban, harus ikut dipertimbangkan. Kedua kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan dan eksploitasi merupakan satu kesatuan dalam upaya pemerintah kolonial mempertahankan kekuasaan dan kepentingan ekonominya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sondarika, W. (2019). Dampak culturstelsel (Tanam Paksa) bagi masyarakat Indonesia dari

tahun 1830-1870. Jurnal Artefak, 3(1), 59-66.

Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 18301870. Estoria: Journal of Social Science and Humanities, 1(2), 119134.

Rosmaida, R. S., Enjel, E. A. B. G., Karel, K. C. S., & Rahma, U. R. D. U. (2025). DAENDELS DAN JALAN ANYER-PANARUKAN: JEJAK PENJAJAHAN PRANCIS DI INDONESIA. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(04), 301-308.

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

Agustin, M, & Syaodih. (2008).*Bimbi-ngan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.\

Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change.* Washington, DC: American Psychological Association.

Artikel in Press :

Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185-2196.

Jurnal :

Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: how individual and profession-level factors influence discussion of disability in prenatal genetic counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 1-3.

Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era grobalisasi. *Pedagogi,* II Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.